

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Achmad Chulaemi, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, Semarang, 1992, hlm. 9

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, 2011, Celeban Timur (Yogyakarta), hlm. 8

Adityo Wibowo. *HPL adalah objek yang diatur*, Loc.cit., hlm. 1

Boedi Harsono, *Dalam definisi hak-hak manajemen*, Semarang 2008, hal 76

Bagi Manan, *pengertian pemerintah dan pemerintahan*, jakarta (2001: 101)

Deddy S.B. & Dadang Solihin, *tujuan peletakan kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah*, surabaya. (2004:32).

Effendi, *dikutip oleh Adityo Ariwibowonama hak pengelolaan lahan*, Bandung 2018.hal 41

Febrian, *Hirarki Aturan Hukum di Indonesia (Disertasi)*, Universitas Airlangga, 2004, hlm.284

Hoessein dalam Hanif, *pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah*, jakarta, 2007: 24

Hanafi Nurcholis, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, PT.Grasindo, Jakarta 2005,hal.6

Hanif Nurcholis, *Konsep teoritis Pemerintah Daerah*, bandung 2007: 13

H.L.A. Hart, 1981, *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, Hlm 77

I Made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 1, 2016

Philipus M. Hadjon, *Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya*, jakarta (1998)

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005, Hlm 89.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Legal Research Methodology and Jurimetry*, Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 13-14.

Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 82.

Urip Santoso, “*Eksisten Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional*” dalam MIMBAR HUKUM Vol.24 Nomor 2 Juni 2012 hlm.284

Soeryono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012

Soejadi, *Pancasila sebagai sumber Tertib Hukum Indonesia*, Jakarta, Lukman Offset, 1999, hlm. 68.

Soerjano Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 23.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

Jimly Asshiddiqie, *Development & Consolidation of Post Amendment State Institutions*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal. 27)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pengertian otonomi daerah*, (2008: 992)

Muhammad dkk., “*Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Batam Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam*”, Dalam Journal of Business Administration Vol 1, No 2, September 2017, hlm.73 pdf

Muhadam Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm:22

Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara ,Paradigma ,Citra Media*, hlm 82

Oxford *Kebijakan otonomi daerah*, jakarta, (2000).

Winahyu Erwiningsih, *konteks hak untuk mengontrol negara dan kewajiban negara*, jakarta 2006. Hal 83

Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* ,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2002,hlm. 76

Wasistiono, *Wewenang Otonomi Daerah*,PT. jakarta, 2008 hal 9.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Departemen Kehakiman RI, *Undang- Undang Dasar 1945*

Republik Indonesia, “UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”

UU No.53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupatean Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

UU No.36 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Keputusan Presiden No.41 Tahun 1971 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Presiden No.25 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden No.41 Tahun 1971 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan-Selanjutnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Pengelolaan Beserta Pendaftarannya

Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

Dan Hak Pengelolaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No.27 Tahun 2017 Tentang Alokasi Lahan

TESIS /LAPORAN-LAPORAN

Sukayadi, dkk., “Laporan Penelitian PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung)”, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1997

Juliani, Tesis “Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Analisis Terhadap Kewenangan Bidang Pertanahan Antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam)”, Medan : Universita Sumatera Utara, 2012, File pdf.

JURNAL DAN MAJALAH

Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No.3 September Tahun 2010, File pdf.

Jurnal Pertanahan, Vol .1 No.1, Jakarta : Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2011, File pdf.

Journal of Business Administration Vol 1, No 2, September 2017, File pdf

Mimbar Hukum Vol.24 Nomor 2 Juni 2012, File pdf.

INTERNET

<https://id.search.yahoo.com/search? Batam+In+Figures+2010> diunduh pada tanggal 9 september 2018

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1854-2017.pdf> diunduh pada tanggal 10 September 2018

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1854-2017.pdf> diunduh pada tanggal 10 September 2018